

## II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan

##### a. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau yang sering dikenal *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh Elkington (1997 dalam Susanto, 2009) yang mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat khususnya komunitas sekitar perusahaan (*people*), serta lingkungan (*planet*).

Menurut Sumaryo (2009), konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumberdaya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat.

ISO 26000 dalam Rachman (2011), menyatakan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Secara garis besar dalam ISO 26000 terdapat tujuh isu utama dalam melaksanakan CSR yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, aktivitas tenaga kerja, lingkungan, aktifitas operasi yang adil, isu konsumen, dan kontribusi pada masyarakat serta pembangunan. ISO 26000 adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial dan bersifat *guideline* (pedoman).

#### **b. Implementasi *Corporate Social Responsibility***

Contoh bentuk kegiatan tanggungjawab sosial menurut Kotler dan Lee (2005) yaitu bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, dan pelatihan kerja bidang tertentu, yang diberikan dapat berupa dana (modal), pinjaman, biaya promosi, tenaga (bimbingan teknis tenaga ahli), peralatan/teknologi, akses informasi, dan sebagainya. Menurut Wibisono (2007 dalam Wicaksosno, 2010), contoh lingkup program CSR yang disarikan dari beberapa perusahaan terkemuka adalah:

1. Bidang sosial, seperti pendidikan/pelatihan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan, keagamaan, dan penguatan kelembagaan.
2. Bidang ekonomi, seperti kewirausahaan, pembinaan UKM, agribisnis, pembukaan lapangan kerja, sarana/prasarana ekonomi, dan usaha produktif lainnya.

3. Bidang lingkungan, seperti penggunaan energi secara efisien, proses produksi yang ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, perumahan dan pemukiman.

**c. Tahapan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Wibisono (2007 dalam Rosyida, 2011) mengemukakan adapun tahap-tahap dalam penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya, yaitu :

1. Tahap perencanaan.

Tahap ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu *Awareness Building*, *CSR Assesment*, dan *CSR Manual Building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan lain-lain. *CSR Assesment* merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Upaya perencanaan kegiatan CSR dapat dilakukan melalui *benchmarking*, menggali dari referensi atau meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

## 2. Tahap implementasi.

Pada tahap ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan seperti pengorganisasian sumberdaya, penyusunan untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, serta penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

## 2. Tahap evaluasi.

Tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR sehingga membantu perusahaan untuk memetakan kembali kondisinya situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi CSR sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi.

## 4. Pelaporan.

Pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

## **2. Konsep PKBL**

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP.04/MBU/2007 menjelaskan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib berpartisipasi dalam memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Dana program kemitraan bersumber dari (1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % , (2) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah

dikurangi beban operasional, (3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus:
  - 1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
  - 2) Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu BUMN Pembina, Mitra Binaan dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN Pembina.
- c. Hibah (hanya diberikan kepada mitra binaan):
  - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian;
  - 2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20 % (duapuluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum serta sarana ibadah.

### **3. Teori Kebutuhan**

#### **a. Pengertian Kebutuhan**

Menurut Arifin (2007), kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia yang muncul secara alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Definisi lain dikemukakan oleh Setiadi (2003), kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan, sehingga bila ada di antara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera.

Menurut Adisasmita (2013), kebutuhan berbeda dengan keinginan yang bersifat sesaat dan untuk menentukan program yang akan di bangun di suatu desa/kecamatan agar sesuai dengan kebutuhan, maka harus didahului dengan kegiatan sosialisasi kepada anggota masyarakat, kegiatan tersebut diantaranya :

1. Menjelaskan pentingnya pembangunan pedesaan.
2. Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki, kebutuhan, dan menghimpun aspirasi masyarakat.
3. Melakukan identifikasi berbagai jenis program yang dibutuhkan masyarakat.
4. Menentukan program pembangunan yang paling penting (prioritas).

5. Upaya/hal lainnya yang diperlukan atau mendukung penentuan program.

#### **b. Tingkatan Kebutuhan Maslow**

Maslow dalam Siagian (2004) mengemukakan bahwa kebutuhan seseorang itu adalah berjenjang. Artinya jika kebutuhan pertama (dasar) telah terpenuhi maka kebutuhan tingkat atasnya akan muncul, kemudian Maslow mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam tingkatan kebutuhan yang selanjutnya disebut hierarki kebutuhan yang terdiri dari :

1. Kebutuhan Fisiologis.

Perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologi ialah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, dan perumahan. Kebutuhan ini dipandang sebagai kebutuhan yang paling mendasar bukan karena setiap orang membutuhkannya terus menerus sejak lahir hingga ajalnya, akan tetapi juga karena tanpa pemuasan berbagai kebutuhan tersebut seseorang tidak dapat dikatakan hidup secara normal.

2. Kebutuhan Akan Keamanan.

Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti keamanan fisik meskipun hal ini aspek yang sangat penting. Segi-segi keamanan yang bersifat psikologis juga mutlak penting mendapat perhatian. Perlakuan yang manusiawi dan adil adalah salah satu contohnya. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk membuat peraturan, undang-undang, sistem, asuransi dan sebagainya. Secara

naluri manusia membutuhkan rasa aman (*safety need*), untuk itu manusia ingin bebas dari segala bentuk ancaman. Dengan kondisi ini aman, maka sumber daya dapat berkembang dengan baik.

### 3. Kebutuhan Sosial.

Telah umum diterima sebagai kebutuhan universal bahwa manusia adalah makhluk sosial. Biasanya dalam kebutuhan sosial tersebut tercermin dalam empat bentuk perasaan, yaitu (1) perasaan ingin diterima oleh orang lain dalam pergaulan dan interaksinya di lingkungan masyarakat, (2) perasaan ingin dianggap penting dalam komunitasnya, (3) perasaan mengalami kegagalan karena setiap manusia memiliki keinginan untuk selalu maju, (4) Perasaan diikutsertakan, kebutuhan ini paling terasa dalam proses pengambilan keputusan.

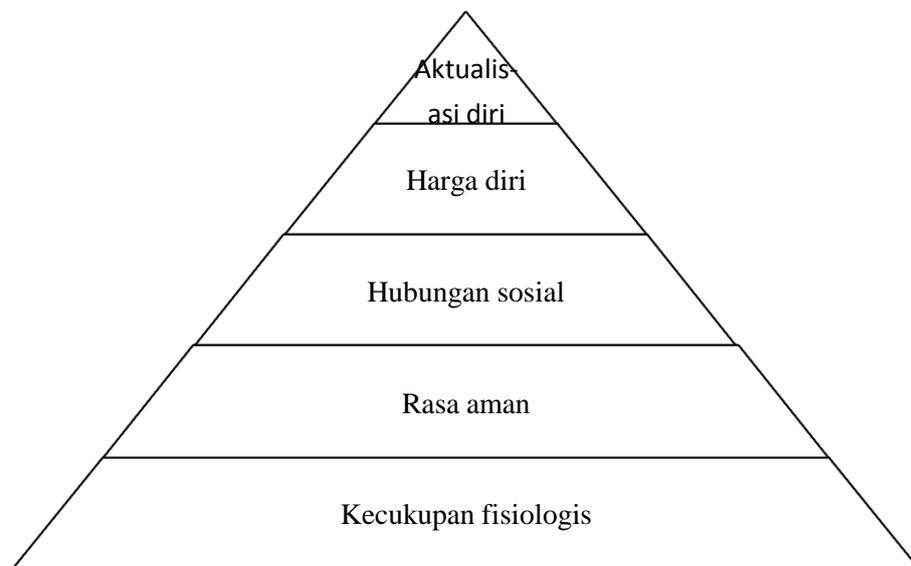
### 4. Kebutuhan Harga Diri.

Salah satu ciri manusia ialah bahwa dia mempunyai harga diri. Karena itu semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. Pada dasarnya jika kebutuhan tingkat relatif rendah sudah terpenuhi maka akan timbul kebutuhan akan harga diri. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri.

### 5. Kebutuhan Aktualisasi Diri.

Kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan harga diri tercapai adalah kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan terakhir dalam

hirarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini menjelaskan bahwa manusia selalu ingin mengembangkan potensi dirinya agar meraih kemajuan profesional yang pada gilirannya memungkinkan yang bersangkutan memuaskan berbagai jenis kebutuhannya. Menurut Maslow, dari urutan-urutan tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengembangan sumber daya manusia baik secara mikro maupun secara makro pada hakikatnya adalah merupakan upaya untuk merealisasikan semua kebutuhan. Adapun piramida hirarki kebutuhan Maslow dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Piramida Hierarki Kebutuhan Manusia Menurut Maslow

## 4. Teori Partisipasi

### a. Pengertian Partisipasi

Terdapat beberapa definisi partisipasi, diantaranya dikemukakan oleh Nasdian (2006 dalam Rosyida, 2011) yaitu proses aktif dan inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses ( lembaga dan mekanisme) sehingga mereka dapat melakukan kontrol secara efektif. Definisi ini memberi pengertian bahwa masyarakat diberi kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri.

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan di daerahnya. Bentuk kontribusi masyarakat dapat berupa tenaga, dana, harta, dan pemikiran (Adisasmita R, 2013).

Menurut Soetrisno (1995), ada dua jenis partisipasi yang beredar di masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan

rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Definisi kedua, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil yang telah dicapai. Uphof (2003 dalam Kali, 2011) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

#### **b. Tahapan Partisipasi**

Cohen dan Uphof (1977 dalam Rosyida, 2011) mengemukakan bahwa sejauhmana keterlibatan para *stakeholders* dalam tahapan penyelenggaraan program digambarkan melalui tingkat partisipasi masing-masing *stakeholder*. Pada setiap tahapan penyelenggaraan, dilihat sejauhmana keterlibatan *stakeholders* , termasuk frekuensi kehadiran, tingkat keaktifan, tingkat pemahaman, dan juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari tiap tahapan penyelenggaraan program , yakni tahap pengambilan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap pengambilan keputusan (perencanaan), yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini yaitu pada perencanaan suatu kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.
2. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Menurut Kaho (2002 dalam Kali, 2011), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tahap yaitu (1) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (2) partisipasi dalam bentuk pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil, (4) partisipasi dalam mengevaluasi. Tjokroamidjojo (1996 dalam Kali, 2011) juga mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang terdiri dari

partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Menurut Pangestu (1995 dalam Febrina, 2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan lama mukim.
2. Faktor eksternal, yaitu meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Menurut Wijayanti (2011), ketika suatu perusahaan telah memberikan sumberdayanya, kemudian muncul permasalahan baru, yaitu masyarakat menjadi tergantung terhadap sumberdaya yang telah diberikan oleh perusahaan. Masyarakat hanya menunggu pemberian dari perusahaan, mereka menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan.

Mereka lupa akan sumberdaya yang mereka miliki sendiri untuk terus dikembangkan. Agar masyarakat tidak menjadi pasif, maka faktor input yang menentukan proses pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri.

Hal-hal dari masyarakat yang mempengaruhi implementasi program CSR adalah kondisi sosial dan ekonomi (usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jumlah beban keluarga).

Murray dan Lappin (1967 dalam Febrina, 2008) menyatakan bahwa terdapat faktor internal lain yang mempengaruhi partisipasi yaitu lama tinggal/lama mukim. Semakin lama tinggal di suatu tempat, semakin besar rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya, sehingga timbul keinginan untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya.

## **5. Konsep Pembangunan dari Bawah (*Bottom Up*)**

Konsep pembangunan *bottom up* adalah konsep yang menghargai masyarakat sebagai sasaran pembangunan secara bijaksana dengan melibatkannya secara langsung sebagai subjek pembangunan dalam menentukan berbagai program yang dibutuhkannya. Perencanaan pembangunan dengan konsep *bottom up* berkaitan erat dengan pembangunan partisipatif dan konsep ini jauh lebih ideal dibandingkan dengan pendekatan *top down* yang cenderung terpusat.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pengembangan masyarakat, pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat

dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Rumusan program-program pembangunan dipedesaan atau disuatu daerah harus dilakukan berdasar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Adisasmita (2013), Penyusunan program-program pembangunan pedesaan yang diusulkan itu dilakukan melalui beberapa analisis , yaitu :

1. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT).
2. Analisis permasalahan yang dihadapi.
3. Analisis kebutuhan/kepentingan.
4. Penyusunan program pembangunan.

Adisasmita (2013) mengemukakan, terdapat beberapa startegi dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah pedesaan, yaitu :

1. Strategi Pertumbuhan.

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningktan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja.

2. Startegi Kesejahteraan.

Strategi kesejahteraan padadasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan sarana dan prasarana sosial lainnya.

### 3. Strategi Tanggap terhadap Kebutuhan Masyarakat.

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan di pedesaan.

Ketiga strategi diatas memiliki kelemahannya masing-masing. Strategi pertumbuhan kelemahannya yaitu semakin lebarnya ketimpangan antar si kaya dan si miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.

## 6. Keterkaitan antara Kegiatan PKBL dengan Partisipasi dan Kebutuhan Masyarakat

Sumaryo (2011), mengemukakan bahwa keberadaan perusahaan di suatu wilayah seharusnya mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan. Dipandang dari perspektif *social justice* masyarakat sekitar perusahaan juga ikut diberdayakan, sehingga terjadi proses *empowerment* melalui kegiatan-kegiatan pelatihan (*capacity building*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dibantu fasilitas (dana, sarana, dan prasarana) agar mereka dapat bekerja dan menciptakan peluang usaha untuk

meningkatkan kualitas kehidupannya. Dipandang dari segi perspektif ”*ecological*” masyarakat diharapkan juga turut menjaga keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan tersebut.

Perusahaan merupakan unit bisnis yang keberadaannya tak dapat dilepas dari lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, eksistensi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat yang juga merupakan bagian dari *stakeholder* (Norhadi, 2011). Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Asyari (2009), teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya.

*Stakeholders* mencakup karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada *core* bisnis perusahaan yang bersangkutan. *Stakeholders* mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Rachman dkk, 2011).

Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *stakeholders* dan masyarakat merupakan *stakeholder* yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.

Bentuk pengimplementasian tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan PTPN VII melalui kegiatan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dalam penentuan program yang akan dilakukan, masyarakat harus ikut terlibat secara penuh, baik sebagai objek maupun sebagai subjek dalam pembangunan. Menurut Adisasmita (2013), dengan adanya keterlibatan

masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengimplementasian kegiatan PKBL merupakan salah satu wadah kegiatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi atau keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan, dimana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis. Pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan mengembangkan kualitas masyarakat. (Nasdian,2003)

## **7. Transformasi Data Ordinal menjadi Data Interval**

Menurut Muhidin dan Abdurahman (2007), transformasi data ordinal menjadi data interval dilakukan agar data yang diperoleh dapat diolah menggunakan operasi matematika seperti ditambah, dikurang, dikali dan dibagi tanpa mempengaruhi jarak relatif diantara skor-skoranya. Karakteristik lainnya dari data interval adalah skala pengukurannya tidak mempunyai nilai nol mutlak. Berbeda dengan data ordinal bilangan/angka yang diberikan kepada objek hanya menyatakan tempat dalam suatu susunan, tidak menyatakan apa-apa mengenai jarak dari satu datum ke datum lainnya tetapi hanya memberikan urutan (rangking) relatif saja.

Data ordinal adalah data kualitatif, mengkuantifikasikan data ordinal adalah dengan cara menghitung frekuensinya dan di buat rangkingnya, Contohnya seperti kualitas sangat baik = 5, baik =4, cukup = 3, kurang baik = 4, dan buruk = 1, sehingga dalam penelitian ini dilakukan transformasi data dari data ordinal ke data interval menggunakan software MSI agar data yang diperoleh dapat diberikan operasi matematika.

## **8. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Suparno (2010), melakukan penelitian mengenai analisis kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa aspek yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu aspek sumberdaya manusia, aspek sumberdaya modal, aspek pemasaran, aspek sarana prasarana, dan aspek lainnya.

Oktaviana (2013) melakukan studi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam usaha menciptakan kemandirian masyarakat. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Pupuk Kalimantan Timur melalui program pinjaman modal usaha membuat masyarakat menjadi tergantung dengan bantuan tersebut. Ketergantungan tersebut muncul karena ada perubahan kondisi usaha ke arah yang lebih baik, mudahnya prosedur pengajuan pinjaman, rendahnya bunga pinjaman yang ditetapkan, jumlah pinjaman yang tergolong besar, dan lain-lain menjadikan program

pinjaman modal usaha dari PKBL sebagai tempat bertumpu dalam hal mendapatkan pinjaman modal usaha.

Sihaloho (2007), melakukan penelitian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan modal sosial PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari Kabupaten Lampung Selatan menjelaskan bahwa strategi pelaksanaan CSR PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari adalah bermitra dengan masyarakat. Namun, kemitraan yang terjalin hanya pada tataran *semi-productive*, yang bersifat kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* antara perusahaan dengan mitranya. Hal ini terjadi karena masyarakat masih dianggap sebagai obyek program, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan dan ketidaktaatan mitra pada aturan yang telah disepakati.

Hasil kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila dengan pihak PT Perkebunan Nusantara VII Unit Bisnis Kedaton melalui penelitian studi formulasi program PKBL di Unit Bisnis Kedaton Kecamatan Jati Agung (2010). Kerjasama tersebut memperoleh hasil bahwa kebutuhan masyarakat yang perlu diberdayakan melalui program PKBL PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah (1) kebutuhan dibidang kesehatan dengan program pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, (2) kebutuhan pendidikan dengan program perbaikan sarana pendidikan serta beasiswa, (3) bidang lingkungan, masyarakat desa membutuhkan pengembangan sarana dan prasarana umum dengan memprioritaskan pada perbaikan jalan yang rusak

dan pembukaan jalan desa untuk mempercepat akses mobilitas masyarakat menuju wilayah unit bisnis Kedaton.

Mutolib (2013), melakukan penelitian mengenai kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan untuk program CSR PT PLN (Persero) Sektor Pembangkit Tarahan di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi prioritas yang dibutuhkan masyarakat sekitar perusahaan untuk program CSR PT PLN meliputi: (1) Strategi bidang ekonomi yaitu mengembangkan potensi dusun untuk meningkatkan kegiatan taraf ekonomi masyarakat seperti potensi batu gunung di Dusun Gotong Royong dan Kampung Baru, potensi laut dan pariwisata di Dusun Sukamaju, dan potensi debu *fly ash* di Dusun Mataram, (2) Strategi bidang sosial: peningkatan kesehatan masyarakat baik melalui pengobatan gratis ataupun pendirian sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas di empat dusun sekitar PT PLN, (3) Strategi bidang lingkungan: perbaikan sanitasi dan drainase dengan pelebaran dan pendalaman siring PT PLN agar tidak menyebabkan banjir di Dusun Gotong Royong, Mataram, Sukamaju dan Kampung Baru.

Kali (2011), melakukan penelitian yang berjudul analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kampung Paneki terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki secara

persentase mayoritas sangat rendah karena proses sosialisasi dari aparat pemerintah tidak berjalan dengan baik, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi masih rendah, dan masyarakat di kampung Paneki lebih mengutamakan melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi masyarakat Paneki pada umumnya termasuk kategori kurang mampu.

Wijayanti (2011), melakukan penelitian yang berjudul “Tingkat Partisipasi Peserta Program CSR Desa Telaga dan Tingkat Kemanfaatan Program di Karawang International Industrial City”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik peserta program beragam, mulai dari usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jumlah beban keluarga. Dari empat jenis karakteristik tersebut, usia, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan yang memiliki hubungan signifikan dengan partisipasi peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi peserta dalam program CSR Desa Telaga tergolong rendah.

Husinsyah (2008), melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT Etam Bersama Lestari. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi seluruh masyarakat adalah jumlah tanggungan, umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lama kerja.

Afifah (2011), melakukan penelitian mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) oleh PT Wirakarya Sakti dalam penguatan ekonomi lokal. Hasil penelitian diperoleh

bahwa PT Wirakarya Sakti sebagai pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) telah mengelola program CSR dengan baik. Bentuk-bentuk penerapan program CSR di perusahaan ini terbagi kedalam 3 kelompok kegiatan yaitu dukungan finansial yang bersifat charity, proyek fisik, dan usaha produktif. Persepsi masyarakat jika dilihat dari aspek ekonomi penerapan program CSR yang dilakukan oleh PT. Wirakarya Sakti, tergolong kategori sedang. Demikian pula halnya dengan partisipasi masyarakat berdasarkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi, secara keseluruhan tergolong sedang.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Pemerintah menegaskan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 bahwa setiap perusahaan BUMN berupa perseroan memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Tanggung jawab perusahaan perseroan kembali dibahas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 74.

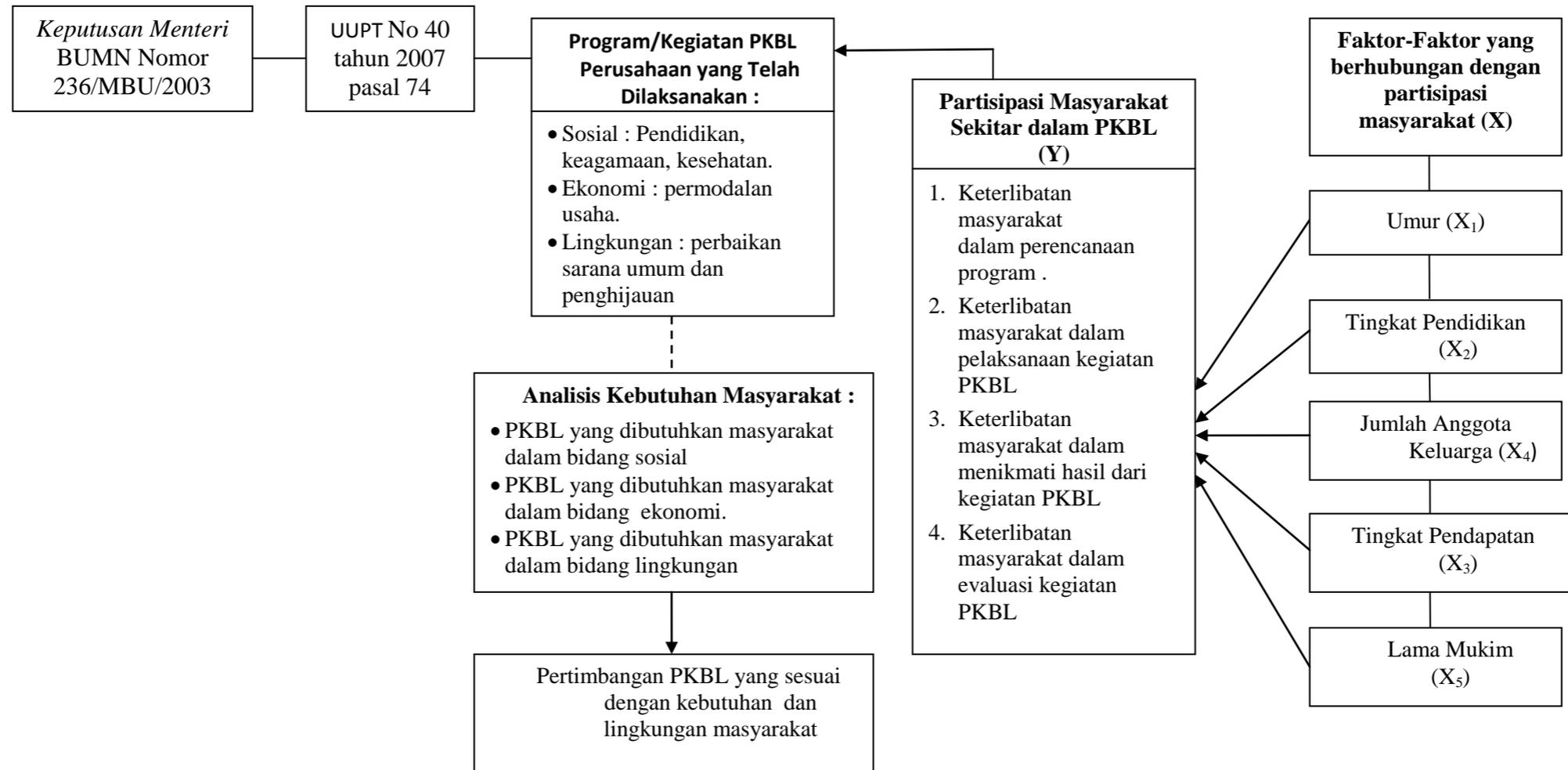
PT Perkebunan Nusantara VII merupakan perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan (*needs*) masyarakat sekitar perusahaan di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk kegiatan PKBL, sehingga dapat diketahui apakah program yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya atau

belum. Analisis yang akan dilakukan adalah analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*) untuk menggali program CSR yang sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, kemudian hasil analisis yang telah diperoleh akan dirumuskan melalui *Focus Group Discussion*. Analisis kebutuhan dan SWOT yang dilakukan digunakan untuk menentukan strategi prioritas program perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan masyarakat.

Keberhasilan kegiatan PKBL perusahaan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat sekitar sebagai salah satu bagian dari *stakeholders*, sehingga dalam penelitian ini juga dianalisis mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKBL yang telah dilakukan perusahaan. Pengimplementasian kegiatan PKBL dikategorikan dalam program-program yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan.

Kegiatan PKBL akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat jika didukung dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara aktif. Sejuahmana keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyelenggaraan program tersebut digambarkan melalui tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1979 dalam Rosyida, 2011) dilihat dari empat kategori, yakni tingkat pengambilan keputusan (perencanaan), tingkat pelaksanaan, tingkat pemanfaatan hasil, dan tingkat evaluasi.

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKBL. Faktor-faktor tersebut meliputi usia ( $X_1$ ), tingkat pendidikan ( $X_2$ ), tingkat pendapatan ( $X_3$ ), jumlah anggota keluarga ( $X_4$ ), dan lama mukim ( $X_5$ ). Variabel Y merupakan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PKBL yang dilihat dari empat indikator. Indikator tersebut dilihat dari empat tahapan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKBL, meliputi tahap perencanaan program, pelaksanaan program, menikmati hasil, dan tahap evaluasi program. Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran analisis kebutuhan dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PKBL PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.



Keterangan:  
 ----- = garis interaksi.  
 —————> = garis hubungan.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Analisis Kebutuhan dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dapat diturunkan beberapa hipotesis berikut ini:

- a. Terdapat hubungan yang nyata antara umur dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari.
- b. Terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan responden dengan partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dalam kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari.
- c. Terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendapatan responden dengan partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dalam kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari.
- d. Terdapat hubungan yang nyata antara jumlah anggota keluarga responden dengan partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dalam kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari
- e. Terdapat hubungan yang nyata antara lama mukim responden dengan partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dalam kegiatan PKBL PTPN VII Unit Usaha Rejosari.